

**KONSPIRASI POLITIK DALAM KRIMINALISASI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Universitas PGRI Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Diah Raseptiana Baiduri

NPM. 12144300048

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

DIAH RASEPTIANA BAIDURI. Konspirasi Politik Dalam Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juni 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk; menganalisis kasus Konspirasi Politik Dalam Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan(1) mengetahui bagaimana konspirasi politik terhadap KPK; serta (2)Bagaimana penyebab terjadinya kriminalisasi dalam KPK.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan data dengan mendiskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan (1) Konspirasi yang terjadi didalam KPK dilakukan oleh beberapa orang yang bersatu menjadi satu dan bekerja sama dalam melemahkan dan menghancurkan KPK. Sasaran para konspirator adalah para pimpinan KPK yang mengetahui kasus-kasus buruk yang telah dilakukan para konspirator.(2) Kriminalisasi di dalam KPK terjadi karena motif balas dendam atas penangkapan Budi Gunawan yang akan dicalonkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, Hal itu menjadikan tindakan kriminalisasi terhadap KPK. Karena setelah penangkapan Budi Gunawan Polri ingin melemahkan KPK dengan cara mengkriminalisasi para anggota-anggota penting KPK dengan cara melaporkan ketiga anggota KPK yang nantinya kalau mereka menjadi tersangka otomatis mereka nonaktif di dalam KPK dan KPK akan lemah.

Kata kunci: Konspirasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kriminalisasi

ABSTRACT

DIAH RASEPTIANA BAIDURI. Political conspiracy In Criminalization of Corruption Eradication Commission (KPK) skripsi. The Faculty of Education University of PGRI Yogyakarta, June 2016.

This research aims to; Political Conspiracy In analyzing the case of criminalization of the Corruption Eradication Commission (KPK); and (1) find out how a political conspiracy against the Commission; and (2) How is the cause of the criminalization of the KPK.

This is a qualitative research method, using literature study. Exposure data in the literature describing obtained and analyzed according to a study that became the focus of discussion. Analysis of the data used in this research is descriptive deductive and inductive.

The results of the study concluded (1) that occur within KPK conspiracy done by some people who are united into one and work together to weaken and destroy the KPK. Aims of the conspirators was the KPK leaders who know the bad cases that have been made by the conspirators. (2) Criminalization in KPK occurs because the motive of revenge for the arrest of Budi Gunawan will be nominated as the sole candidate for the Chief of Police by President Joko Widodo, That makes the actions of criminalization of KPK. Because after the arrest Budi Gunawan Police want to weaken the KPK by way of criminalizing the important members of the Commission by way of the three members of the Commission reported that later if they become automatically suspect them off at the Commission and the Commission will be weak.

Keywords: Conspiracy, the Corruption Eradication Commission, Criminalization

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSPIRASI POLITIK DALAM KRIMINALISASI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

Skripsi oleh Diah Raseptiana Baiduri ini
telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diuji.



Yogyakarta, 11 Juni 2016

Dosen Pembimbing



Armansyah Prasakti, SH.,S.Pn., M.H
NIP. 19651110 1992021 001

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

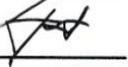
**KONSPIRASI POLITIK DALAM KRIMINALISASI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

Oleh :

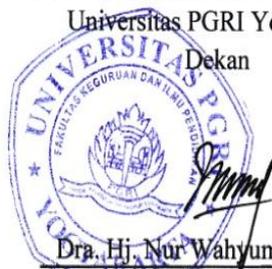
DIAH RASEPTIANA BAIDURI
NPM. 12144300048

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2016.

Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	: Dra. Hj Nur Wahyumiani, M.A		16/8 - 2016
Sekretaris	: Supri Hartanto, M.Pd		16/8 - 2016
Penguji I	: Sigit Handoko, S.H.,M.H		16/8 - 2016
Penguji II	: Armansyah Prasakti, SH., Sp.N.,MH		16/8 - 2016

Yogyakarta, 16 Agustus 2016
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta
Dekan



Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A
NIP. 19570310 198503 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diah Raseptiana Baiduri

NPM : 12144300048

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Konspirasi Politik Dalam Kriminalisasi Komisi Pemberantasan
Korupsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini, benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



Diah Raseptiana B

NPM. 12144300048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu, berpetualanglah sejauh mungkin agar engkau mengetahui kehidupan yang sebenar-benarnya karena hidup itu bukan untuk berdiam diri,” (Penulis)

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku dan adikku Andar Prastiwi di Kalimantan barat, Eyang Putri, Eyang Kakung serta Ibu Nanik dan Bapak Sukino yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk kesuksesanku.
2. Dosen-dosen prodi PPKn yang telah memberikan ilmunya.
3. Teman-temanku Dina, Agus, Eko, Erika, Samsul, Ukhti, Tantri, Anita, Dhita, Desy, Titis, Ica, Feny, Diah, Erna, Ibah, dan teman lainnya yang selalu memberi semangat.
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Karya ini merupakan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 jalur skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd., Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh studi di Universitas PGRI Yogyakarta.
2. Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Yitno, SH., MH, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah menyetujui judul penelitian.
4. ArmansyahPrasakti, SH.,S.Pn, M.HPembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Karya skripsi ini telah dibuat secara maksimal, namun apabila masih terdapat kekurangan, Penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak sanat dinantikan untuk perbaikan penulisan di masa datang. Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi berbagai pihak, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu Pendidikan.

Yogyakarta, 11 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Masalah	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Isi Skripsi	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Pengertian Konspirasi.....	11

B. Pengertian Politik.....	17
C. Pengertian Kriminalisasi.....	25
D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	32
BAB III HASIL PENELITIAN	58
A. Konspirasi Politik Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi	58
B. Penyebab Terjadinya Kriminalisasi di dalam KPK	78
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Lampiran 2 : UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Politik merupakan aspek kehidupan manusia yang mempunyai nilai fundamental dan selalu menarik untuk didiskusikan, Politik berguna sebagai ruang publik dimana kepentingan dan aspirasi rakyat berkuasa (Fauzi Akbar : internet diunduh tanggal 28 Desember 2015).

Politik ideal merupakan politik yang berkiblat atau mengabdikan pada kepentingan rakyat, sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Selain itu politik ideal harus berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan dan demokratis, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses politik. Di dalam politik ideal tidak ada yang namanya politik untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok karena hal itu sama saja merugikan rakyat Indonesia sendiri (Fauzi Akbar, 2014: internet diunduh tanggal 28 Desember 2015).

Politik ideal merupakan politik yang terlihat keharmonisannya dalam membangun perpolitikannya. Keharmonisan ini dapat diperlihatkan ketika para pejabat negara bersama-sama dalam menangani permasalahan yang ada di Indonesia. Di dalam menjalankan tugas negara ini para pejabat negara harus menjalankannya dengan baik, karena para pejabat negara

sudah dipilih oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam tugas kenegaraannya (Fauzi Akbar, 2014 : internet diunduh tanggal 28 Desember 2015).

Situasi politik di Indonesia saat ini sangat buruk, keterpurukan ini disebabkan oleh perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Saat ini para pejabat negara hanya mementingkan dan merebutkan kekuasaan demi kepentingan individu dan kelompoknya masing-masing. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji-janji yang dulu dibuat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang diperoleh.

Kondisi politik di Indonesia saat ini tidak jauh dari perebutan kekuasaan, para politisi sampai melupakan keadaan rakyat yang sangat membutuhkan kinerja para pejabat negara yang *relevan*. Saat ini yang terlihat hanyalah janji-janji para pejabat negara yang tidak ada buktinya, bukan kinerja yang diperlihatkan melainkan kejahatan yang mereka lakukan di dalam Negeranya sendiri yaitu mereka melakukan Korupsi yang jelas-jelas hal itu sangat merugikan rakyat dan negara.

Keadaan politik sekarang ini di Indonesia tidak seperti yang di inginkan, bahwa politik Indonesia merupakan sesuatu yang hanya mementingkan dan merebutkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesiapun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh rakyat yang mengeluh bahwa hidup mereka belum di sejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah

Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik (Ermansyah Djaja, 2008 : vii)

Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai ketika para pejabat negara dapat memenuhi janji-janjinya, tetapi yang terjadi melainkan para pejabat negara melakukan tindakan yang sangat merugikan negara dan rakyat yaitu melakukan korupsi. Saat ini tindakan korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara yang bertugas sebagai wakil rakyat, tapi pejabat Daerah juga banyak yang melakukan tindak korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (Ermansyah Djaja, 2008 : vii)

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (Evi Hartanti, 2005: 67).

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan koruptor, Kasus-kasus korupsi selalu terdengar beberapa tahun belakangan ini. Korupsi merupakan tindakan yang memperkaya diri dengan cara yang tidak semestinya yaitu mencuri dan menggunakan hak orang lain demi kepentingan pribadi.

Dampak dari Korupsi itu sendiri sangat banyak sekali terutama bagi kehidupan masyarakat miskin di desa dan di kota. Korupsi menyebabkan Anggaran pembangunan dan Belanja Nasional berkurang jumlahnya. Bila kasus korupsi di Indonesia dibiarkan terus menerus pengaruh korupsi paling besar merupakan perlawanan dari rakyat, karena ketidakpuasan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia juga akan mendapatkan pandangan sinis dari masyarakat, membuat masyarakat tidak percaya lagi pada sistem pemerintahan di Indonesia.

Kondisi politik di Indonesia yang saling merebutkan kekuasaan dan mengempungkan kepentingan pribadi itu membuat timbulnya suatu bentuk interaksi yang terjadi diantara beberapa orang dan bersifat rahasia, serta menunjukkan keterfokusan dalam suatu pokok tujuan dan ketika teraktualisasi akan menimbulkan ketidakpuasan diantara pihak yang lain.

Hal ini bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja tetapi banyak orang bahkan banyak kelompok yang melakukan tindak korupsi untuk mendapatkan kesejahteraan politisi itu sendiri.

Penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, *independent* serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Banyaknya politisi yang melakukan tindak korupsi di Indonesia, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaannya diancam oleh beberapa pihak karena KPK mempunyai tugas untuk mengusut dan menyelidiki bahkan menangkap siapa saja yang melakukan tindak korupsi. Serangan terhadap keberadaan KPK juga muncul dari politisi lembaga yang anggota atau pimpinannya menjadi terdakwa terpidana kasus korupsi oleh KPK, Sehingga semakin banyak pihak yang mengecilkan atau bahkan membunuh KPK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya Konspirasi dalam Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Adanya Kriminalisasi dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu Konspirasi Politik dalam Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana konspirasi politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana penyebab terjadinya kriminalisasi dalam Komisi Pemberantasan Korupsi?

E. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui analisis Bagaimana konspirasi politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kriminalisasi dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara praktis dan teoritis yaitu:

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan gambaran umum tentang terjadinya konspirasi politik KPK dan memberikan pemahaman dan gambaran umum tentang terjadinya kriminalisasi dalam KPK.
2. Manfaat teoritis untuk memberi pemahaman kepada pembaca tentang analisis konspirasi politik dalam KPK dan memberi pemahaman kepada pembaca tentang kriminalisasi dalam KPK.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan/*library research* atau juga sering disebut dengan penelitian *literature*. Penelitian kepustakaan lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis dari pada uji empiris di lapangan (Suyadi, 2011: 64).

Metode *literature* membahas suatu topik untuk memecahkan suatu masalah terhadap bahan pustaka, berupa informasi teoritis berupa referensi dari buku-buku, jurnal, koran, majalah, artikel serta undang-undang yang berkaitan dengan konspirasi politik dalam kriminalisasi KPK.

Penelitian dengan menggunakan kajian pustaka ini untuk menggali gagasan dan pemikiran baru sehingga dapat dikembangkan untuk memecahkan masalah. Penelitian dengan menggunakan metode ini, Penulis dapat mengembangkan teori yang berkaitan dengan konspirasi politik dalam kriminalisasi KPK.

2. Teknik Pengumpulan data

a. Dokumen

Penelitian kepustakaan atau *library research* teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi/studi pustaka. Teknik pengumpulan data secara dokumentasi/studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Study Pustaka

Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui sumber-sumber literatur mengenai konspirasi politik dalam kriminalisasi KPK. Sumber pustaka diantaranya buku-buku, buku teks, indeks jurnal, indeks bulletin dan majalah, koran, serta sumber-sumber lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengorganisasikan secara sistematis, mencermati dengan kritis, dan selalu menggunakan pendekatan filosofis (Suyadi, 2011: 64). Teknik analisis data yang digunakan antara lain :

a. Metode deduktif

yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

b. Metode induktif

yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Teknik ini berpangkal dari fakta khusus kemudian menuju kesuatu statemen yang menerangkan faktor-faktor tersebut (Sukardi, 2004:12).

c. Metode deskriptif

yaitu sistem pemecahan masalah dengan mnngumpulkan dan menyusun data, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Penelitian deskriptif merupakan non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

H. Sistematika Isi Skripsi

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyusun sistematika isi skripsi sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang Masalah
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Pembatasan Masalah
 - D. Perumusan Masalah
 - E. Tujuan Penelitian

F. Manfaat Penelitian

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Isi Skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Konspirasi

B. Pengertian Politik

C. Pengertian Kriminalisasi

D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BAB III HASIL PENELITIAN

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA